

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.**

Menurut Todaro (2011) pembangunan bukan hanya tentang gejala ekonomi, melainkan dalam pengertian yang sebenarnya pembangunan harus mencakup lebih dari sekedar aspek kebendaan dan keuangan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya dipandang sebagai suatu proses perubahan yang mencakup reorganisasi seluruh sistem ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Hudiyanto (2014) yang mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya mengarah kepada dua hal yaitu peningkatan pendapatan per kapita dan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Sehingga, secara umum pembangunan ekonomi bisa terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi dengan adanya perubahan kontribusi dari setiap sektor-sektor yang mendukung.

Dalam proses terjadinya pembangunan tentu saja terdapat hal-hal yang menjadi indikator agar suatu pembangunan dapat dinyatakan berhasil maupun tidak. Berikut dikemukakan beberapa indikator dari pembangunan menurut Hudiyanto (2014) :

##### **a. PDB (Produk Domestik Bruto)**

Produk Domestik Bruto merupakan indikator pembangunan yang paling sering digunakan. Pertumbuhan PDB yang tinggi dianggap merupakan indikator peningkatan kesejahteraan atau indikator ekonomi yang diasosiasikan langsung dengan pertumbuhan kesejahteraan.

b. PDRB Per Kapita (Produk Domestik Bruto Per Kapita)

PDB per kapita merupakan total produk atau pendapatan dalam suatu negara yang diperhitungkan dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Walaupun tidak selalu mencerminkan kesejahteraan total namun PDB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

c. Indeks Mutu Hidup Fisik

Tingkat kesejahteraan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita penduduk. Dengan tingginya pendapatan tetapi tidak diikuti dengan perbaikan mutunya maka tingkat kesejahteraanpun tidak baik. Maka dari itu, muncul indikator yang disebut dengan Indeks Mutu Hidup. Indeks ini mempertimbangkan beberapa aspek non ekonomi untuk mengukur pembangunan dengan menggabungkan beberapa variabel berikut :

- 1) Tingkat kematian bayi, yaitu jumlah kematian bayi yang berusia di bawah satu tahun per 1000 yang hidup.
- 2) Tingkat harapan hidup, yaitu sampai beberapa tahun rata-rata orang hidup di suatu negara.
- 3) Tingkat melek huruf, yaitu beberapa persen dari penduduk yang bisa membaca huruf latin.

d. Indeks Pembangunan Manusia

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator pembangunan yang diukur bukan saja secara ekonomi namun juga mempertimbangkan tiga variabel yaitu panjangnya umur manusia sebagai cerminan dari kecukupan nutrisi dalam masyarakat, pendidikan, dan standar hidup (PDB per kapita).

e. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Indeks ini mengukur pembangunan dengan cara melihat seberapa besar perhatian pemerintah terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk. Kebutuhan dasar tersebut dirujuk pada hal-hal berikut yaitu makanan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, pasokan air bersih, dan perumahan.

Dalam proses pembangunan ekonomi dengan sendirinya akan membawa perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi. Perubahan tersebut dilihat dari 2 sisi, jika dilihat dari sisi permintaan agregat, perubahan struktur ekonomi terutama di dorong oleh peningkatan pendapatan. Sehingga pertumbuhan ini dapat membawa perubahan selera masyarakat yang terefleksi dalam perubahan pola konsumsi. Sedangkan jika dilihat dari sisi penawaran agregat, terdapat beberapa faktor pendorong utama yaitu perubahan/kemajuan teknologi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan penemuan bahan-bahan baru untuk proses produksi. Faktor-faktor dari sisi penawaran (produksi) ini juga merupakan faktor yang penting sebagai sumber terjadinya pertumbuhan. Sehingga dapat diduga adanya suatu hubungan yang berkesinambungan antara pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan yang berkesinambungan ini dalam periode jangka panjang dapat membawa perubahan struktur ekonomi lewat efek dari sisi permintaan (peningkatan pendapatan masyarakat), dan pada waktunya perubahan tersebut dapat menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.

a. Teori Klasik.

Awal munculnya literatur klasik pada saat pasca terjadinya Perang Dunia II, dimana pembangunan ekonomi di dominasi oleh empat aliran pemikiran utama yang saling bersaing yaitu : model tahapan pembangunan pertumbuhan linear, teori dan pola perubahan structural, revolusi ketergantungan-internasional, dan kontrarevolusi pasar bebas neoklasik. Berikut beberapa pemikiran dan pandangan tokoh aliran klasik dalam (Michael P. Todaro, 2011) :

1) Tahapan Pertumbuhan Rostow

Model pembangunan tahapan pertumbuhan ini merupakan sebuah teori pembangunan ekonomi yang dicetuskan oleh sejarawan ekonomi Amerika Walt W. Rostow. Menurutnya sebuah negara dikatakan bergerak jika melalui tahapan berurutan dalam upaya mencapai kemajuan dengan startegi yang tepat yaitu : masyarakat tradisonal, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan, dan jaman konsumsi masal yang tinggi. Tetapi, langkah pertama dari seluruh proses yang panjang ini dimulai dengan menghilangkan hambatan pada masyarakat tradisional agar dapat mulai bergerak maju.

2) Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Model hubungan ekonomi yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto bergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto dan berbanding terbalik dengan rasio modal output nasional. Ini artinya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan juga investasi, sedangkan rasio modal output nasional yang memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan jumlah modal

yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk dalam periode waktu tertentu mengalami hubungan yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

### 3) Teori Pembangunan Lewis

Teori pembangunan yang menyatakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional di transfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi, dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan.

#### b. Teori Neo Klasik

Munculnya teori ini berawal dari neoklasik dalam teori dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh pandangan tokoh pada literatur sebelumnya. Di negara maju, pendekatan ini berpihak pada kebijakan makro ekonomi dari sisi penawaran dan privatisasi perusahaan negara. Sedangkan di negara berkembang, teori ini mendesak untuk adanya pasar yang lebih bebas serta peniadaan campur tangan dan regulasi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Teori neoklasik dikelompokkan menjadi tiga komponen pendekatan :

##### 1) Pendekatan Pasar Bebas

Analisis teori ini merupakan ciri-ciri suatu sistem perekonomian yang melangsungkan pasar bebas, yang sering didasarkan dengan asumsi bahwa pasar yang tidak diregulasi akan memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan adanya campur tangan pemerintah di dalamnya.

##### 2) Pilihan Publik

Teori ini juga dikenal sebagai pendekatan ekonomi politik baru yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi mengendalikan semua perilaku individu dan bahwa pemerintah tidak efisien dan korup karena orang-orang menggunakan pemerintah untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

### 3) Pendekatan “Ramah Pasar”

Dalam pendekatan ini dinyatakan bahwa pembangunan yang berhasil mengharuskan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pasar beroperasi secara efisien, dengan hanya melakukan intervensi secara selektif jika terjadi kegagalan pasar.

#### c. Teori Modern

Akibat dari kelemahan teori-teori terdahulu, maka adanya penekanan pada pentingnya pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, faktor-faktor produksi yang sangat penting tidak hanya mengandalkan banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas SDM dan kemajuan teknologi, energi, kewirausahaan bahan baku, dan material. Sehingga dalam teori modern ini asumsi pentingnya adalah sifat keberadaan teknologi yang tidak lagi eksogen (given), tetapi merupakan salah satu faktor produksi yang dinamis serta peran manusia yakni tenaga kerja di dalam fungsi produksi tidak lagi merupakan faktor yang eksogen, tetapi bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (Tambunan, 2011).

### 3. Pembangunan Ekonomi Wilayah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang sangat penting dimana terjadinya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka

panjang adalah indikator terpenting di dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi dalam pengertian secara mikro menurut Arsyad (1999) pengertian pembangunan ekonomi wilayah sendiri merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah tujuan utama yang harus dicapai adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat didalamnya harus mampu menggunakan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Berikut teori pertumbuhan dan pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Arsyad (1999) :

- a. Teori ekonomi neo klasik yang menganalisis pembangunan daerah (regional) memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Arsyad, 1999).
- b. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Jadi teori ini beranggapan bahwa strategi

pembangunan daerah sangat berkaitan dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar daerah dan didirikan di daerah tersebut.

- c. Teori tempat sentral menganggap bahwa adanya hirarki tempat yang dimana terdapat gabungan dari tempat-tempat kecil yang menyediakan sumberdaya kepada setiap tempat sentral. Tempat sentral tersebut merupakan pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang menjadi pendukung tadi. Teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada ekonomi daerah dengan beberapa daerah menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan wilayah lainnya menjadi daerah pemukiman.

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999:307) yaitu :

- a. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang sebenarnya memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional. Dimana daerah tersebut merupakan bagian dari lingkungan nasional dan memiliki keterkaitan secara mendasar serta adanya konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
- b. Segala sesuatu hal yang terlihat baik dalam skala nasional harus sejalan dengan yang terjadi pada daerah, begitu juga sebaliknya.
- c. Perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan dapat diambil manfaatnya.

#### 4. Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah



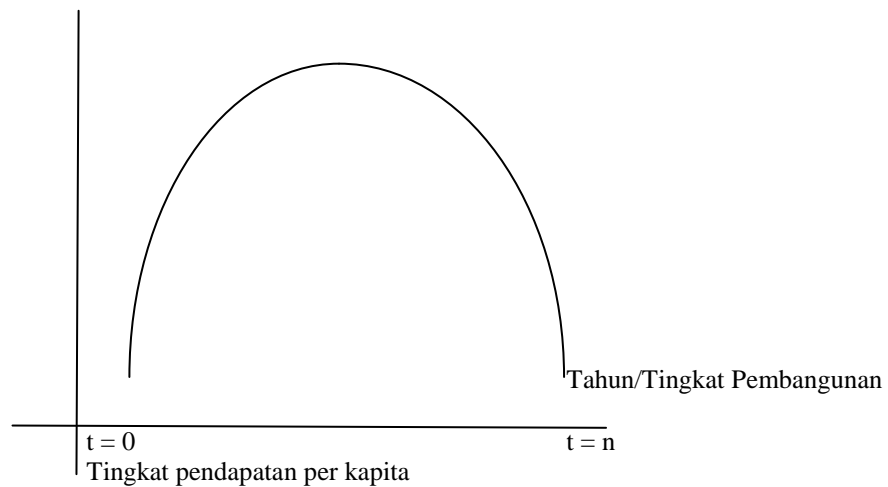
Dalam studi empiris yang dikatakan oleh Kuncoro (2013) terdapat dua jenis ketimpangan yaitu :

- a. Ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat dengan indikator yang digunakan adalah Indeks Gini dan Kurva Lorenz.
- b. Ketimpangan antar daerah, hal ini muncul akibat tingkat aktivitas ekonomi yang masih terkonsentrasi pada daerah-daerah maju sehingga pembangunan yang dicapai oleh suatu daerah yang lebih maju selalu lebih cepat di bandingkan dengan daerah lain.

Untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan sebuah daerah dapat dilihat dari berbagai macam cara tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non ekonomi. Penilaian dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non-pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan cerminan dari merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya.

Literatur mengenai perubahan ketimpangan pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut dengan hipotesa Kuznets. Dengan memakai data lintas Negara dan data deret waktu dari sejumlah survey observasi di setiap Negara, Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang bebrbentuk U terbalik. Hasil ini diintrepertasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan atau dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri (Tambunan, 2011). Berikut adalah kurva hipotesis kuznet :

Tingkat kesenjangan/ kemiskinan



Sumber : (Tambunan, 2011)

### **Gambar 2.1.**

#### Hipotesis Kuznets

Kurva tersebut menggambarkan pada awalnya proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada sektor industri di perkotaan sudah padat merayap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari perdesaan, pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi penciptaan pendapatan. Jadi hipotesa U terbalik ini didasarkan pada argumentasi teori dari Kewid mengenai perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan.

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia menurut Suherlin (2013) :

#### a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Banyak hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya ketimpangan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Salah satu faktor utama diantaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.

Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentunya lebih cenderung dapat melakukan proses produksi lebih lancar jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih sedikit. Pada waktunya kondisi seperti inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan daerah menjadi tidak merata dan mengalami ketimpangan.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku serta kebiasaan etos kerja yang dimiliki masyarakat di daerah yang tersebut. Faktor pendorong terjadinya ketimpangan antar suatu daerah yang satu ini sangat berpengaruh terhadap produktifitas kerja masyarakat daerah yang bersangkutan. Daerah yang memiliki kondisi demografis yang baik tentu memiliki produktifitas yang tinggi. Sebaliknya, daerah yang memiliki kondisi demografis yang rendah maka menyebabkan produktifitas masyarakatnya relatif rendah pula sehingga akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi investor dalam menyediakan lapangan kerja di daerah tersebut.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Dalam kegiatan perdagangan antar daerah dan juga migrasi baik yang didukung oleh pemerintah (transmigrasi) maupun migrasi spontan merupakan mobilitas barang dan jasa. Lancar atau tidaknya hal tersebut dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, karena

barang dan jasa yang di produksi tidak dapat di distribusikan dengan baik serta akan menyebabkan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat di manfaatkan oleh daerah lain.

d. **Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah**

Faktor utama lain yang dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi pada daerah yang terkonsentrasi tinggi cenderung akan lebih maju dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat konsentrasi ekonomi yang rendah. Hal tersebut akan mendorong proses pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja dan juga pendapatan masyarakat.

e. **Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah**

Dana pembangunan wilayah yang di peroleh suatu daerah yang berasal dari investasi pemerintah maupun swasta sangat berpengaruh penting terhadap proses pembangunan. Daerah yang dapat menarik investor lebih banyak akan mempercepat proses pembangunan lewat penyediaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Sebaliknya, daerah yang sulit menarik minat para investor akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembangunan. Hal inilah yang akan menimbulkan ketimpangan antar daerah di wilayah tersebut.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam pelaksanaan pembangunan setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda sehingga seringkali terjadi ketimpangan pembangunan yang menjadi masalah yang serius bagi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, selain

mengetahui perubahan ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan cara perhitungan menggunakan Indeks Williamson, juga menentukan pola/klasifikasi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat di jelaskan melalui Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, serta menentukan sektor unggulan yang terdapat pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat serta penentuan sektor unggulan yang terdapat pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut ini adalah studi dan peneleitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Crossandra Undulifolia (2012) dengan judul penelitian Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2009. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Williamson, *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen. Hasil dari penelitian ini adalah sektor listrik, gas, dan air bersih termasuk sektor yang berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus dan ketimpangan tergolong tinggi.

Doni Mahardiki (2013) dengan penelitian yang berjudul Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Indonesia 2006-2011. Dengan menggunakan metode Indeks Williamson hasilnya menunjukan pergerakan yang meningkat pada 2011, *Entropy Theil* menunjukan penurunan pada 2011 tetapi mengalami kenaikan di tahun akhir penelitian, *Paired Sample T-Test* menunjukan ketimpangan pendapatan yang signifikan pada 2011 dibandingkan 2006, dan Tipologi Klassen menunjukan wilayah cenderung maju tapi tertekan.

Erni Panca Kurniasih (2013) dengan judul jurnal Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznets. Metode yang

digunakan adalah data panel. Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Wawan Budiarto (2014) dengan judul Analisis Disparitas Pendapatan dengan Menggunakan Koefisiensi Gini dan Indeks Williamson. Menggunakan metode Indeks Gini dan Indeks Williamson. Hasil dari penelitian ini adalah disparitas pendapatan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2010 memiliki koefisien gini yang rendah yaitu sebesar 26,09 persen dan Indeks Williamson yang tinggi sebesar 55,20 persen.

Denny Iswanto (2015) melakukan penelitian dengan judul Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, Tipologi Sektoral, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil, Korelasi Pearson. Hasil dari analisis ini adalah 23 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur termasuk daerah relatif tertinggal, disparitas pendapatan antar daerah sebesar 0,429 serta mengalami kenaikan, dan hipotesa U terbalik Kuznets hubungan pertumbuhan dan ketimpangan tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, selain mengetahui besaran tingkat ketimpangan yang terjadi selama tahun penelitian dan mengetahui kasifikasi wilayah menurut pertumbuhan ekonominya, juga mencari penyebab terjadinya perubahan ketimpangan tersebut. Beberapa cara dalam melaksanakan pemerataan pembangunan adalah dengan melakukan peningkatan infrastruktur serta penyediaan sarana yang memadai. Dengan menggunakan *Location Quotient (LQ)*, Indeks Williamson, serta Tipologi Klassen

maka dapat diketahui wilayah mana yang membutuhkan infrastruktur dan sarana dalam mempercepat proses pemerataan.

### C. Kerangka Analisis

